

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan pesisir merupakan daerah potongan laut dan darat yang menjadikan ekosistem wilayah pesisir rawan mengalami perubahan. Sekitar 21% populasi penduduk dunia hidup di wilayah pesisir yang merupakan zona penting dan mempunyai peran vital dalam perkembangan ekonomi di beberapa negara (Nair et al., 2012: 117). Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai panjang garis pantai 99.093 km, dengan Desa Pesisir sebanyak 25.224 desa (Kementrian Kelautan dan Perikanan, KPDA, 2015). Hal itu menunjukkan potensi bahari di Indonesia sangat besar dan membutuhkan pengelolaan yang benar terkait dengan aktivitas manusia untuk dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut UU RI No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, potensi sumberdaya kawasan pesisir mencakup sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain), sumberdaya non hayati (pasir, air laut, mineral dasar laut), sumberdaya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan), dan jasa lingkungan (keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir). Karenanya, masyarakat yang hidup di kawasan pesisir sangat bergantung pada kondisi sumberdaya pesisir (Hadi, 2014).

Pengertian masyarakat pesisir sendiri mengacu pada UU No. 27 tahun 2007 merupakan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir mempunyai ciri khas di antaranya;

menggantungkan hidup pada sumberdaya laut, iklim, lingkungan, pasar, dan sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Haba dan Siburian, 2016:22). Karakteristik masyarakat pesisir terbagi menjadi dua yakni pembudidaya dan nelayan (Satria, 2015:7). Menurut Satria (2015:7) pembudidaya ikan dapat tergolong masyarakat agraris karena relatif mempunyai sifat sumberdaya yang terkontrol. Pembudidaya ikan mempunyai pola pemanenan lebih terkontrol karena dapat mengetahui berapa dan kapan ikan ditangkap. Selain itu, masukan produksi (benih dan makanan) juga dapat diketahui pembudidaya ikan, sehingga dapat memperkirakan berapa yang harus disediakan untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Adapun karakteristik nelayan, mesti berpindah tempat untuk memperoleh hasil yang maksimal karena tempatnya bersifat open akses (*open access*) meskipun dengan elemen resiko lebih tinggi. Masyarakat pesisir dapat membudidaya bandeng dan udang dengan memanen dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, biasanya berasal dari ikan kecil dan udang liar yang berasal dari air laut yang membawa telur dan benih udang ke tambak warga (Kompas, 20 Maret, 2017: 1).

Wilayah pesisir dan laut menjadi tumpuan strategis dan menjadi lokasi berbagai kegiatan yang saling tumpang tindih ketika sumberdaya di daratan sudah semakin menipis, seperti pelabuhan, pertanian, perikanan, permukiman dan kawasan industri yang tidak terkoordinasi dengan baik (Hadi, 2014). Wilayah pesisir juga sering menjadi tempat sampah dari berbagai aktifitas di ruas tengah dan hulu seperti limbah padat, limbah cair dan segala buangan di buang ke sungai yang kemudian bermuara di pantai (Hadi, 2014). Berbagai macam kegiatan tersebut memberi tekanan yang berat pada lingkungan sehingga menimbulkan berbagai bencana seperti fenomena rob atau banjir pasang, abrasi, akresi, pencemaran yang menimpa hampir di sepanjang pesisir Jawa menjadi indikasi terlampauinya daya dukung

lingkungan (*environmental carrying capacity*) (Hadi, 2014). Kegiatan perekonomian dan pertanian yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan pengelolaan tata guna lahan menyebabkan pesisir bersifat rentan (Marfai & King, 2007:1507 dalam Marfai, 2012:226; Marfai, 2012:47; Zubritckaia, 2015:1). Salah satu bentuk kerentanan pesisir dan fenomena bencana akibat terlampauinya daya dukung lingkungan di antaranya adalah terjadinya abrasi. Abrasi merupakan proses terkikisnya garis pantai oleh hantaman dan gelombang dan arus laut. Permasalahan abrasi di antaranya karena pemanfaatan pesisir yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga menimbulkan degradasi lingkungan dan rusaknya ekosistem pesisir khususnya mangrove dan terumbu karang. Hal itu karena disebabkan karena salah satunya oleh pembukaan kawasan pertambakan dari wilayah konservasi mangrove, industri, dan pemukiman (Mulyadi & Fitriani, 2011:12).

Mangrove merupakan tumbuhan yang mampu menahan gelombang air laut yang dapat mengikis garis pantai. Melalui kemampuannya tersebut, mangrove mempunyai peranan penting untuk mengurangi bencana abrasi pesisir. Indonesia tercatat mempunyai 4,2 juta ha mangrove di sepanjang 95.000 km garis pantai pada tahun 1980 (Murdiyarsa et al., 2015:8). Indonesia tercatat mempunyai luas hutan mangrove urutan kedua di dunia setelah Brazil (Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012). Namun selama 20 tahun mangrove mengalami penurunan hingga 26% atau 3,1 juta ha (Giri et al, 2011 dalam Murdiyarsa et al 2015:9). Penurunan jumlah mangrove kembali terjadi pada tahun 2005 sekitar 2,9 juta ha (FAO, 2007 dalam Murdiyarsa, 2015:9). Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 40% hutan mangrove berkurang selama tiga dasawarsa terakhir dengan penurunan rata-rata pertahun sekitar 1,24% (Murdiyarsa et al., 2015:8). Sekitar 44,73% atau 1,7 juta hektar mangrove rusak di dalam kawasan hutan, dan 87,50% atau 4,2 juta hektar rusak di luar kawasan hutan (Bismark et al, 2008:34). Hutan

mangrove mengalami pengurangan seluas 513.670 ha yang terjadi pada tahun 1982-1993 dan penurunannya mencapai 46.697 ha per tahunnya (Gunawan dan Anwar, 2005 dalam Bismark et al., 2008:35). Menurut *Asian Wetland Bureau* (2007) dalam Bismark et al. (2008:35) yang tersisa hanya 2,5 juta ha dari luas hutan mangrove yang ada di Indonesia.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Kelautan Perikanan dalam Angka, 2015) menyebutkan sedikitnya 400 km (km) panjang pantai telah tergerus abrasi dari 17 provinsi pada 100 lokasi. Total lahan di pesisir di Indonesia yang hilang mencapai 29.261 ha selama 15 tahun terakhir dengan laju abrasi mencapai 1.950 hektar per tahun (Kompas edisi 20 Maret, 2017:13). Perubahan lingkungan wilayah pesisir akibat abrasi dan rob berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir seperti yang terjadi pada Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung di pesisir utara kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Timbulsloko pada Tahun 2007 terkena lampisan laut hingga 2 meter yang mengakibatkan warga jatuh miskin karena sawah tergerus air, hampir 90 persen tambak udang dan bandeng yang menjadi tumpuan hidup hilang, tanggul terendam dan masyarakat terpaksa meninggikan rumah agar bagian dalam rumahnya terhindar dari genangan air laut dengan menyiapkan dana Rp 8 juta-Rp 10 juta (Kompas edisi 26 Juli, 2017:23). Abrasi terparah dialami Pantai Utara Jawa dengan total panjang garis pantai yang tergerus abrasi mencapai 44% atau 745 km. Total luasan area yang hilang karena abrasi di Jawa setara 10.988 hektar. Sebagian besar abrasi pesisir ditimbulkan dari aktivitas manusia dan dampak pembangunan. Seperti pada pembangunan dermaga di Muara Dadap, Indramayu, dan pembangunan saluran beton untuk mengambil air laut yang menjorok ke laut di Tambak Inti Rakyat Karawang (Kompas, 27 Januari 2017:13).

Pantai Utara Jawa Barat pada tahun 2008 mengalami abrasi sekitar 50% dari total panjang keseluruhan, dengan abrasi paling panjang terjadi di kawasan pantai Indramayu yaitu

sekitar 48,57 km (BPLHD Jawa Barat, 2008). Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dalam BPLHD (2008) menyebutkan bahwa 60% dari 147 km panjang garis pantai Indramayu, mengalami abrasi. Menurut Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu (2005) dalam BPLHD (2008), penyebabnya adalah pembukaan lahan hutan mangrove untuk dijadikan konversi tambak secara berlebihan oleh penduduk pesisir Kabupaten Indramayu. Luas hutan mangrove dari semula 8.000 ha menjadi 1.600 ha selama 20 tahun terakhir (Rusdianti & Sunito, 2012:10). Penebangan hutan mangrove untuk alih fungsi lahan menjadi tambak merupakan penyebab menyusutnya luas hutan mangrove, begitupun alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Karangsong (Rusdianti & Sunito, 2012:2).

Karangsong merupakan salah satu desa pesisir di Indramayu yang mengalami abrasi di tahun 1995 dan 2007. Tahun 1995 abrasi di Karangsong dengan luas area pantai yang hilang mencapai 2143,2 ha. Pada tahun 2007 terjadi lagi abrasi di Karangsong. Tambak masyarakat hancur mencapai luas 127,30 ha mengakibatkan budidaya udang dan ikan bandeng mengalami kegagalan (Nur'aeni, Silviana, & Triyono, 2016:13). Karangsong yang merupakan desa pesisir dengan tanah timbul seluas 45 ha di tahun 1969-1983 (*Data Mangrove for the Future*, 2015) mengalami abrasi karena konversi dan pembangunan tambak bandeng di jalur hijau atau sempadan pantai di tahun 1962. Hal tersebut mengakibatkan kurang berfungsinya jalur hijau mangrove sebagai pelindung alami dan menyebabkan rusaknya 9.191 ha atau 52 % dari 17.782 ha luas total kawasan yang berpotensi mangrove. Tahun 1995 tingkat abrasi pantai mencapai 3,2 m/ tahun dan luas area pantai yang hilang mencapai 2143,2 ha (Harahap, 2001:4). Abrasi tersebut berpengaruh pada habitat dan ekosistem biota laut dan berdampak pada tidak bertahannya biota air payau seperti kerang dan kepiting yang tidak berkembang biak dalam keadaan mangrove yang rusak (Harahap, 2001:3). Nelayan pencari kepiting dan kerang pun

kehilangan pendapatannya karena mereka kesulitan menemukan kepiting dan kerang di sekitar hutan bakau. Abrasi juga menyebabkan perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya bekerja di sektor agraris, seperti pertanian dan pertambakan (Damaywanti, 2013:367), mengalami perubahan mata pencaharian karena hilangnya lahan tambak dan pertanian mereka. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Desa Timbulsko, yang mengalami penurunan luas tambak 70%, dan Desa Surodadi, yang mengalami penurunan luas tambak sebanyak 28%, juga penurunan produksi hasil tambak masing-masing desa sebesar 46% dan 79% setelah abrasi (Ismail, Hariyanto, & Suharini, 2012:57). Selain itu, hilang atau rusaknya lahan pemukiman juga menyebabkan masyarakat meninggalkan rumahnya yang terkena abrasi (Damaywanti, 2013:367).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi abrasi di antaranya yaitu melakukan upaya perlindungan buatan dan perlindungan alami. Perlindungan buatan di antaranya dengan menggunakan teknologi perlindungan pantai seperti *breakwater* lepas pantai, pembangunan penahan atau turap dan pemecah gelombang di beberapa titik, serta pemasangan *groin* (Wilisandy, Giri and Saputro, Heru, 2006; Salamun, 2016; dan Istijono, 2013:44). Sedangkan upaya perlindungan alami dilakukan dengan penanaman mangrove (Salamun, 2016:17). Penanaman mangrove atau kegiatan rehabilitasi mangrove di Indonesia tercatat pada tahun 2012 hingga 2016 dengan luasnya mencapai 22.261 ha. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, rehabilitasi mangrove yang dilakukan semenjak tahun 2008 hingga 2010 mencapai 536 ha (Status Lingkungan Hidup, 2012; Statistik Kondisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Semenjak tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Kantor Perkebunan dan Kehutanan, sudah melakukan penanaman sedikitnya 1,4 juta pohon untuk mewujudkan

kegiatan gerakan rehabilitasi mangrove. Penanaman tersebut utamanya dilakukan di kawasan yang kondisi hutannya sudah cukup kritis (Status Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, 2008). Penanaman mangrove di Desa Karangsong mulai dilakukan pada tahun 1998 karena adanya kerjasama tawaran dari pemerintah dengan LSM *Wetland International-Indonesia Programme* (WI-IP) untuk merehabilitasi dan mengelola mangrove dengan partisipasi masyarakat. Namun program tersebut hanya berjalan sampai tahun 2003. Semenjak saat itu, mangrove Karangsong kembali terbengkalai dan kembali mengalami abrasi kurang lebih 127,30 ha di tahun 2007. Pada tahun itu pula, sebagian masyarakat yang diprakarsai oleh kelompok Pantai Lestari, memulai kegiatan rehabilitasi mangrove dengan fokus penghijauan wilayah pesisir dan pemanfaatan tanah timbul untuk budidaya mangrove (Nur'aeni et al., 2016).

Pantai Karangsong merupakan kawasan pesisir dengan aktivitas pertambakan, pelabuhan ikan dan ekowisata mangrove. Diketahui bahwa tahun 2008 Indramayu berstatus sebagai pantai terabrasi terbesar di Jawa Barat. Akibat abrasi tersebut banyak tambak, rumah penduduk dan fasilitas warga, serta ribuan hektar sawah tenggelam (BPLHD Jawa Barat, 2008). Abrasi yang terjadi di Karangsong membuat sebagian warga yang tergabung dalam kelompok Pantai Lestari mulai melakukan upaya pemulihan dengan penanaman pohon mangrove. Kegiatan rehabilitasi tersebut dimulai pada tahun 2007 dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder* setempat. Upaya rehabilitasi Karangsong merupakan kerjasama antara komunitas Pantai Lestari dengan beberapa LSM dan program CSR dari perusahaan setempat. CSR yang diterima merupakan bagian dari program perusahaan setempat dengan komunitas Pantai Lestari di Desa Karangsong. Perusahaan dengan dana CSR-nya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi. Sedangkan LSM yang mengarahkan program rehabilitasi tersebut serta membantu mengelola dana dari program CSR perusahaan. Adanya bantuan dari LSM, komunitas tersebut

berhasil melakukan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan *stakeholder* setempat. Pada tahun 2015, Karangsong dinobatkan menjadi mangrove *center* untuk wilayah Jawa Barat oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia.

Rehabilitasi mangrove di Karangsong dilakukan dengan pendekatan *community development*. *Community development* merupakan strategi untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan sendiri solusinya (Hadi, 2017:16). Menurut Islam (2014:262), objek *community development* yaitu untuk meningkatkan *community empowerment*, *community participation*, mobilisasi dan integrasi sumberdaya, kesejahteraan komunitas, dan keadilan. *Community empowerment* merupakan proses untuk memberdayakan masyarakat sehingga menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mempengaruhi hidupnya (Mardikanto dan Soebiato, 2019:45). *Community empowerment*, merupakan salah satu konsep penting dalam *community development*, selain modal sosial. Proses pemberdayaan masyarakat atau *community empowerment* melibatkan individu, organisasi, dan komunitas untuk memperoleh kekuasaan dan mengontrol kehidupan mereka (Islam, 2014:262). Sedangkan *Community participation*, merupakan pelibatan masyarakat pada proses pembangunan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *community development* mencakup pemberdayaan dan partisipasi, yaitu proses yang melibatkan masyarakat untuk memperoleh kekuatan (*power*) dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengontrol hidupnya sendiri.

Pada proses *community development*, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, mengimplementasikan rancangan, serta membangun strategi memperoleh sumber eksternal yang dibutuhkan dengan mengedepankan peluang pada masyarakat untuk memutuskan apa yang diinginkan sesuai dengan kemampuan,

kemauan dan pengetahuan masyarakat sendiri (Alfitri, 2011). *Community development* dilakukan baik berasal dari masyarakat setempat, program pemerintah, LSM, maupun bina lingkungan dari perusahaan BUMN maupun swasta. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan dimana keterlibatan masyarakat merupakan sebuah keharusan dan harus dilakukan pada tahapan awal perencanaan (Hadi, 2017: 15). *Community development* terdapat gagasan perubahan dari bawah. Karenanya, dalam *community development*, masyarakat tingkat lokal mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga masyarakat seharusnya mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri, bagaimana untuk menetapkan kebutuhan dan bagaimana cara memenuhinya (Ife dan Toseriro, 2016:241). Sehingga praktik *bottom-up* penting dalam *community development*. Selain itu, dalam pengembangan masyarakat partisipasi harus diupayakan maksimal yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif baik pada proses maupun kegiatan masyarakat, juga untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individunya (Ife dan Toseriro, 2016: 285). Pada level global, *community development* melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja, memuat gagasan tentang kelangsungan ekologis (Ife dan Toseriro, 2016: 377).

Gagasan tentang kelangsungan ekologis tersebut diantaranya diwujudkan melalui ekowisata. Diketahui bahwa ekowisata mangrove merupakan bentuk penggunaan lahan yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan, dan menyediakan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal melalui nilai tidak langsung sumber daya alam (Basyuni et al., 2018). Keberhasilan rehabilitasi mangrove di Karangsong kemudian menjadikan hutan mangrove di Karangsong dikembangkan menjadi Ekowisata mangrove. Sebagaimana Dahuri (1996) menyebutkan bahwa salah satu pemanfaatan ekosistem mangrove yang paling memungkinkan dan tidak merusak ekosistem mangrove diantaranya meliputi penelitian ilmiah,

pendidikan, dan rekreasi terbatas atau ekowisata. Konsep ekowisata mangrove di Karangsong dimulai pada tahun 2014 yang peletakan batu pertama dalam pembangunan trek jogging di kawasan hutan mangrove dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia. Pada tahun 2015, Karangsong diresmikan sebagai mangrove *center* di Wilayah Barat Indonesia oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selama ini ekowisata dipromosikan dan disebarakan sebagai strategi untuk membiayai inisiatif konservasi, dan disaat yang sama dapat menyumbang pembangunan ekonomi dari komunitas setempat dan memberikan pengalaman wisata yang berkualitas (Basyuni et al., 2018). Dalam dunia pembangunan, konsep ekowisata dikaitkan dengan inisiatif pembangunan berkelanjutan, yaitu merupakan strategi *community development* dan regional dalam konservasi wilayah yang dilindungi (Wall, 2003:19). *Community development* juga menyerahkan kekuasaan dan perencanaan kepada komunitas jika komunitas akan dijadikan agen dalam program pembangunan dan pengelolaannya. Pemberdayaan lokal dapat berperan sebagai kunci utama pada *community development* melalui wisata ekologis dan budaya (Thornburg, 2017).

Selain karena sumberdaya alam mempunyai pengaruh positif pada *community development* dan keberlanjutan (Tsaur, Lin, & Lin, 2006: 647), melalui ekowisata, komunitas mengontrol sumberdaya lokal untuk membuat peluang ekonomi bagi sasaran (hasil) lokal, serta dapat memberikan kesempatan besar dimana *community development* akan lebih efektif dan berkelanjutan (Thornburg, 2017). Karenanya, Scheyvens (1999) mengemukakan bahwa *framework* pemberdayaan didesain untuk menganalisis dampak ekowisata pada komunitas lokal. Rehabilitasi mangrove Desa Karangsong seperti yang telah disebutkan, pada mulanya dilaksanakan karena adanya tawaran pemerintah dengan *Wetland International-Indonesia Programme* (WI-IP) yang merupakan pola pemberdayaan masyarakat berbasis penyadaran

lingkungan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, beberapa LSM dan bina lingkungan dari perusahaan BUMN maupun swasta turut serta dalam rehabilitasi mangrove Karangsong. Keberhasilan *community development* masyarakat Karangsong dalam merehabilitasi pesisir di Karangsong menimbulkan masalah baru diantaranya adanya berbagai klaim keberhasilan dari *stakeholder* yang terlibat baik itu dari perusahaan maupun pihak pemerintah. Selain itu, keberhasilan tersebut memberikan lebih banyak peluang pihak luar untuk mengintervensi program-program yang dapat menguntungkan dan juga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mencari bukti dugaan-dugaan tersebut dan berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan memfokuskan pada *community development* di Karangsong dan dampaknya pada kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Pemberdayaan masyarakat pada rehabilitasi dan ekowisata mangrove di pesisir Karangsong, memberikan dampak positif maupun dampak negatif baik bagi lingkungan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dampak positif dari *community development* diantaranya keberhasilan masyarakat dengan *stakeholder* sekitar untuk merehabilitasi pesisir juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari keberhasilan program tersebut, diantaranya adanya klaim dari berbagai *stakeholder* yang terlibat dan juga dapat memicu munculnya ketidakmandirian dan ketergantungan masyarakat Karangsong terhadap program kerjasama tersebut. Berbagai klaim yang muncul dari berbagai *stakeholder* adalah sebagai dampak dari pengembangan kawasan konservasi hutan mangrove yang merupakan hasil dari rehabilitasi mangrove, menjadi mangrove *center* dan ekowisata

mangrove. Kelestarian lingkungan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang sinergis antara dampak sosial, ekonomi dan lingkungan

Pada penelitian ini akan dieksplorasi proses *community development* pada rehabilitasi mangrove di Karangsong, serta proses berkembangnya kawasan konservasi hutan mangrove (yang merupakan hasil dari rehabilitasi mangrove) menjadi kawasan ekowisata mangrove. Proses *community development* pada rehabilitasi mangrove berdampak pada hasil rehabilitasi mangrove, yaitu kawasan konservasi mangrove di Karangsong. Begitupun dengan proses *community development* pada ekowisata mangrove berpengaruh pada pengelolaan kawasan ekowisata tersebut. Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *community development* dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong ?
2. Bagaimana dampak lingkungan, ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari rehabilitasi mangrove di Karangsong ?
3. Bagaimana peran berbagai *stakeholder* dan dampak dari peran tersebut bagi *community development* di Karangsong ?
4. Bagaimana model *community development* rehabilitasi dan ekowisata mangrove dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Karangsong ?

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai *community development* dalam rehabilitasi mangrove dan pengelolaan ekowisata di wilayah pesisir berkaitan dengan pembangunan pesisir berkelanjutan sudah banyak dilakukan, baik oleh peneliti Indonesia maupun peneliti luar negeri. Beberapa penelitian dengan topik sejenis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil
1	Kamariah Abdullah, Abdullah Mohammad Said, Dasimah Omar (2014) Social and Behavioral Sciences No. 135 Jurnal	Community-Based Conservation in Managing Rehabilitation in Perak and Selangor	Bagaimana faktor psikologi dalam community-based conservation (CBC) mempengaruhi kemauan untuk ikut berpartisipasi (WTP) dalam rehabilitasi mangrove.	Mayoritas responden merupakan WTP (<i>willingness to participate</i>) pada rehabilitasi mangrove. WTP berhubungan dengan gender, pendidikan, ras, kebermanfaatan, serta resiko tetapi tidak berkorelasi dengan faktor jauhnya tempat tinggal. Rekomendasi pendekatan CBC harus diorganisir oleh institusi rehabilitasi mangrove komunitas lokal
2	V.S Avilla Foucat (2002) Ocean & Coastal Management Journal No. 45 Jurnal	Community-based ecotourism management moving towards sustainability, in Ventanilla, Oaxaca, Mexico	Menilai keberlanjutan dari proyek <i>Community-Based Ecotourism Management</i> (CBEM) di Ventanilla yang berlokasi di selatan Mexico	Keberlanjutan CBEM dari indikator berkelanjutan seperti kohesi komunitas, memberikan keuntungan yang adil, komitmen untuk pengelolaan dan konservasi dalam konteks politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Evaluasi pengelolaan ekowisata berbasis komunitas di Ventanilla dilakukan dengan perspektif Integrated Coastal Management menggunakan indikator berkelanjutan.
3	Sarah L Hitchner, Florence Lapu Apu, Lian Tarawe, Supang Galih Sinah, Nabun Aran, dan Ellyas Yesaya (2010) Journal of Ecotourism Vol. 8 No. 2 Jurnal	Community-based transboundary ecotourism in the Heart of Borneo: a case study of the Kelabit Highlands of Malaysia and the Kerayan Highlands of Indonesia	Mengevaluasi <i>community-based</i> ekowisata lintas negara di pegunungan Kelabit di Sarawak-Malaysia dan pegunungan Kerayan di Kalimantan-Indonesia.	Tantangan pengembangan ekowisata yaitu perlindungan area hutan dan budaya, komunikasi, promosi, persiapan dan pembagian keuntungan yang merata, meningkatkan infrastruktur wisata, legalitas lintas batas internasional, dan kontrol masyarakat lokal.
4	Felix G.Bello, Brent Lovelock, Neil Carr (2016) Journal of Ecotourism	Constraints of community participation in protected area-based tourism planning: the case of Malawi	Mengevaluasi implementasi partisipasi komunitas lokal serta pandangan masyarakat desa, para	Faktor yang membatasi partisipasi komunitas; apatis, pengetahuan yang tidak cukup, sumber keuangan, informasi yang tidak mencukupi, pendidikan yang rendah, penyaluran keuntungan yang tidak adil, kekurangan sumber daya manusia

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil
	Jurnal		<i>stakeholder</i> , pengelola ekowisata dan LSM pada wilayah perlindungan	yang terlatih, administrasi yang terpusat, ketiadaan koordinasi, serta konflik manusia yang luas. Kerena itu dibutuhkan advokasi yang lebih besar untuk partisipasi komunitas dan menggabungkan strategi tertentu yang dapat memfasilitasi partisipasi komunitas.
5	Amber Greening (2014) Tesis Utah State University Human Dimensions of Ecosystem Science and Management Tesis	Understanding Local Perceptions And The Role Of Historical Context In Ecotourism Development: A Case Study Of St. Kitts	Persepsi komunitas pada ekowisata dan nilainya bagi kura-kura laut serta menjelaskan timbulnya pentingnya persepsi ini di dua desa dari Pulau Karibia St. Kitts	Peran ekowisata dalam mengubah kegigihan marginalisasi masyarakat lokal dari sumberdaya mereka dengan melakukan pendekatan pengembangan partisipasi untuk ekowisata melalui kolaborasi antar komunitas yang ada serta jejaring sosial
6	Muhammad Khazali Harahap (2001) Tesis IPB Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Tesis	Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat)	Bagaimana strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove, Kegiatan apa yang dilakukan untuk mendukung pengembangan strategi tersebut, dan strategi yang dikembangkan sudah cukup optimal atau belum	Strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove dilakukan dengan pembinaan, pelatihan dan bantuan usaha berkorelasi positif dengan partisipasi responden dalam perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan hutan mangrove. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pendampingan kelompok hingga mandiri
7	Iwang Gumilar, 2012 Jurnal Akuatika Vol. III No. 2 Jurnal	Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu	Menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove yang ada di Wilayah Pesisir Indramayu	Partisipasi masyarakat Indramayu dalam upaya pelestarian hutan mangrove berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi atau tingkat "tokenisme" yaitu suatu tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, namun tidak memiliki kemampuan untuk

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil
				mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.
8	Aditya Cahya Putra, Sutrisno Anggoro, Kismartini (2014) Jurnal Sainstek Perikanan UNDIP Vol. 10 No. 2 Jurnal	Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Kajian Ekosistem Mangrove Di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.	Mengetahui kondisi dan potensi lingkungan mangrove di Pulau Pramuka; mengkaji kesesuaian dan daya dukung ekowisata di kawasan mangrove di Pulau Pramuka; serta menyusun penetapan arahan strategi pengembangan ekowisata mangrove	Pulau Pramuka yang merupakan wilayah pesisir memiliki hutan mangrove dengan jenis mangrove <i>Rhizophora stylosa</i> dengan kualitas lingkungan yang sesuai untuk karakteristik pertumbuhan dan adaptasi mangrove. Memiliki kesesuaian layak untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove dengan Nilai Kesesuaian Ekowisata (NKE) sebesar 279 dan daya dukung maksimal ekowisata sebanyak 114 orang/hari dengan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya wisata alam dan wisata bahari.
9	Konny Rusdianti dan Satyawan Sunito Jurnal Sosiologi Pedesaan/IPB Vol.6 No.1 tahun 2012 Jurnal	Konversi Lahan Hutan Mangrove serta Upaya Penduduk Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove di Karangsong	Bagaimana kronologi konversi mangrove menjadi tambak, aktor dan peran masing-masing dalam rehabilitasi dan konversi. Persepsi masyarakat pada kegiatan tersebut dan bentuk partisipasinya	Persepsi dari para responden berada pada kategori medium. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam kegiatan rehabilitasi. Selain itu Peraturan Desa yang sudah ada mengenai pengelolaan daerah perlindungan mangrove Desa Karangsong tidak disosialisasikan dengan baik sehingga sebagian besar penduduk tidak mengetahui peraturan yang telah dibuat tersebut.
10	Minerva I. Morales, Jimmy T. Masagca, Aurora E. Araojo, and Sonia R. Vargas (2014) International Conference on Latest Trends in Food, Biological & Ecological Sciences (ICLTFBE'14)	Coastal and Mangrove Eco-Tourism in Catanduanes Island (Philippines): A Menace or Bonus	Mendiskusikan tentang potensi besar dari ekowisata pada pesisir Catanduanes dalam konteks tanggungjawab ekowisata terkait dengan pembangunan berkelanjutan	Dibutuhkan peningkatan ekowisata dan kewaspadaan mengenai keberlanjutan kehidupan biota laut. Regulasi ekowisata dapat menjalankan tujuan tersebut. Status ekonomi dari masyarakat miskin harus dievaluasi disaat yang sama ancaman serius pada kehidupan biota laut dapat dihindari dengan ekowisata.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil
	July 15-16, 2014 Phuket (Thailand) Jurnal			
11	Josua Leo Putra, Sukaya Sastrawibawa, Indah Riyantini (2012) Jurnal Perikanan dan Kelautan UNPAD Vol. 3 No. 3 Jurnal	Pengaruh Kerapatan Mangrove terhadap Laju Sedimen Transpor di Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu	Bagaimana pengaruh kerapatan mangrove terhadap laju sedimen transpor dan abrasi yang terjadi di wilayah pantai Karangsong Teknik survei dan analisis vegetasi mangrove dengan	Kerapatan mangrove tingkat pohon di stasiun I dikategorikan baik, sedangkan di stasiun II dikategorikan rusak berat. Hubungan antara kerapatan mangrove di Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu menunjukkan ketika kerapatan mangrove tinggi maka laju sedimen transpor akan rendah dan sebaliknya ketika kerapatan mangrove rendah maka laju sedimen transpor akan tinggi.
12	Rino Adiwibowo Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM Vol. IV No. II Jurnal	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)	Bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 tahun 2006 dan Hambatan apa yang dihadapinya.	Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga
13	M. Abdus Salam, Lindsay G.Ross, Malcolm C.M.Beveridge (2000) Institute of Aquaculture, UK Jurnal	Eco-tourism to protect the reserve mangrove forest the Sundarbans and its flora and fauna	Bagaimana meminimalisasi dampak dari intervensi wisatawan pada ekowisata	Wisata berbasis alam bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Wisata yang direncanakan dengan baik dapat menyediakan insentif politik dan ekonomi untuk pengelolaan yang layak juga bagi konservasi serta memberikan manfaat lain bagi masyarakat lokal dan ekonomi daerah.
14	Regina Scheyvens (1999)	Ecotourism and the Empowerment of Local Communities	Mempertimbangkan jalan mana yang lebih baik untuk memahami dampak usaha	Kerangka untuk menentukan dampak inisiatif ekowisata pada komunitas lokal adalah pemberdayaan ekonomi,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil
	Tourism Management Journal No. 20 Jurnal		ekowisata pada kehidupan masyarakat sekitar serta lingkungan	pemberdayaan psikologi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan politik
15	Fuad Muhammad (2012) Disertasi IPB Prodi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Disertasi	Model Ekowisata Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Daya Dukung Fisik Kawasan Dan Resiliensi Ekologi (Kasus Ekowisata Mangrove Blanakan, Subang, Jawa Barat)	Bagaimana pengembangan model pengelolaan hutan mangrove berdasarkan daya dukung fisik dan resiliensi ekologi	Model pengelolaan yang dikembangkan adalah berdasarkan skenario <i>Bisnis as Usual</i> , pro lingkungan, pro pengelolaan dan pro komunitas.
16	Eni Nur'aeni, Ana Silviana, Triyono (2016) Diponegoro Law Jurnal Vol.5 No.3 Jurnal	Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu	Latar belakang pemanfaatan tanah timbul dan hambatan dalam pelestarian hutan mangrove	Hambatan yang dihadapi di antaranya penebangan pohon oleh segelintir masyarakat, perburuan satwa endemik mangrove, saling mengakui untuk dijadikan sebagai program berbasis lingkungan antara Pertamina dengan Instansi Pemerintah Daerah.

Penelitian terkini tentang ekowisata dilakukan oleh Bello, Lovelock, dan Carr (2016) tentang implementasi yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ekowisata dengan studi kasus di Malawi. Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa fokus kajian hanya pada ekowisatanya saja, rehabilitasinya saja, atau pengelolaan mangrovenya saja. Hal ini dapat dilihat pada Hitchner (2010) yang mengkaji ekowisata berbasis komunitas, Foucat (2002) pada keberlanjutannya, Greening (2014) pada persepsinya, Scheyvens (1999) pada pemberdayaannya, serta Muhammad (2012) pada model ekowisata, dan Putra et al., (2014) pada strategi pengembangan ekowisatanya. Selain itu, kajian mengenai rehabilitasi juga hanya difokuskan pada evaluasi rehabilitasi mangrove berbasis komunitas (Abdullah et al., 2014), evaluasi partisipasi pada wilayah konservasi (Bello et al., 2016), serta partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan mangrove (Gumilar, 2012; Khazali, 2001), dan pelestarian kawasan hutan mangrove (Nuráeni, 2016).

Sedangkan pada penelitian ini, fokus kajian tidak hanya pada rehabilitasi saja, atau ekowisata saja, melainkan keduanya. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara hasil rehabilitasi mangrove yang dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Pengembangan menjadi ekowisata mangrove tidak lepas dari adanya intervensi *stakeholder*. Sehingga, penting untuk diketahui bagaimana proses *community developmentnya*, keterlibatan *stakeholder* dan dampaknya dari intervensi *stakeholder*, serta tipologi *community developmentnya*. Penelitian yang komperhensif tersebut dapat melengkapi penelitian awal yang sudah dilakukan oleh Rusdianti dan Sunito (2012) yang sudah lebih dulu mengkaji persepsi dan bentuk partisipasi, serta peran aktor dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong. Namun, penelitian Rusdianti dan Sunito (2012) hanya berorientasi pada kegiatan rehabilitasi saja, karena di tahun tersebut, kawasan konservasi mangrove

Karangsong masih belum dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Analisis peran juga hanya pada aktor yang melakukan rehabilitasi mangrove, yaitu Kelompok Pantai Lestari. Sedangkan dalam penelitian ini, analisis tidak hanya pada kelompok Pantai Letari, tetapi juga pada Pemerintah Desa Karangsong, dan Pertamina RU VI Balongan yang merupakan *stakeholder* dan tidak terbatas pada aktor.

Berdasarkan pemaparan tersebut, belum ada penelitian yang mengevaluasi penerapan *community development* dalam rehabilitasi mangrove, yang mengkaji dampak lingkungan, ekonomi dan sosialnya. Demikian pula tentang peran *stakeholder* dan dampaknya bagi *community development* di Karangsong. Pengaruh peran tersebut pada pengelolaan ekowisata, yang dikaji dengan menggunakan indikator pembangunan ekowisata berkelanjutan dan proses *community development*, sehingga dapat dikembangkan model *community development* rehabilitasi dan ekowisata mangrove dalam pembangunan pesisir berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan model *community development* yaitu rekognisi yang dicapai dengan *agency* dan *capacity building*. Melalui kedua aspek tersebut akan didapat tujuan *community development* yaitu untuk mendapatkan pengakuan bahwa kelompok tidak hanya sekedar sekumpulan orang yang berasal dari satu daerah geografis yang sama, tetapi sebagai sebuah komunitas masyarakat yang mampu menghadapi masalah dan memanfaatkan kapasitas mereka untuk kemajuan mereka sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tipologi *community development* dari *self-help* menjadi *directed* karena adanya intervensi *stakeholder*. Namun, intervensi tersebut tidak melulu berdampak negatif sebagaimana hasil penelitian Gyan dan Ampomah (2016:1), yang menyebutkan bahwa intervensi *stakeholder* pada perencanaan dapat memicu konflik dan menghambat proses *community development*. Dampak positif intervensi *stakeholder* justru

memunculkan inovasi sosial sebagaimana hasil penelitian Han et al., (2013). Sebaliknya, pada interaksi *stakeholder* justru tidak sesuai dengan pernyataan Han et al., (2013), bahwa model keterlibatan *stakeholder* bertahap dari identifikasi kebutuhan, interaksi, dan inovasi sosial. Sedangkan pada penelitian ini, model keterlibatan *stakeholder* berawal dari partisipasi, jejaring, dan inovasi sosial.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengungkap bagaimana proses *community development* dalam upaya rehabilitasi konservasi mangrove serta pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Desa Karangsong, Indramayu. Selanjutnya diharapkan kajian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Tujuan khusus penelitian ini yaitu menguraikan *community development* yang ada dan telah dilakukan di Desa Karangsong untuk kemudian menganalisisnya sehingga didapat tipologi *community development* dengan karakteristik tertentu di desa tersebut. Kemudian mengaitkan tipologi tersebut dengan ekowisata sehingga diperoleh gambaran *community development* pada rehabilitasi dan ekowisata mangrove dalam pembangunan berkelanjutan.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji penerapan *community development* dalam rehabilitasi mangrove di Karangsong.
2. Mengkaji dampak lingkungan, ekonomi dan sosial dari rehabilitasi mangrove di Karangsong.

3. Mengkaji peran berbagai *stakeholder* dan dampak dari peran tersebut bagi *community development* di Karangsong.
4. Membuat model *community development* rehabilitasi dan ekowisata mangrove dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini merupakan penerapan teori *community development* pada upaya rehabilitasi mangrove dengan mengembangkan model pengelolaan ekowisata berkelanjutan berbasis komunitas sebagai konsep yang dapat dikaji secara ilmiah, khususnya pada ekowisata mangrove. Manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat **teoritis** adalah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai *community development* pada rehabilitasi dan ekowisata dalam pembangunan berkelanjutan. Kontribusi ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah tentang rehabilitasi dan ekowisata mangrove berbasis komunitas
2. Manfaat **praktis**: hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam perumusan kebijakan dalam rehabilitasi mangrove dan ekowisata dalam kaitannya dengan pembangunan pesisir berkelanjutan. Sehingga dapat tercapai pembangunan seimbang baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungannya. Bagi masyarakat Karangsong sendiri, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pengelolaan ekowisata dan konservasi mangrove sehingga menjadi acuan dalam membuat program dan kebijakan dalam pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan di wilayah pesisir.